

BAB I

GAMBAR UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Latar Belakang PUPR

Istilah “Pekerjaan Umum” adalah terjemahan dari istilah Bahasa Belanda “ Openbare Werken “ yang pada zaman Hindia Belanda disebut “Waterstaat Swerken“. Di lingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh Dep.Van Verkeer & Waterstaat (Dep.V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept.Van Guovernements Bedri Jven dan Dept. Van Burgewrljke Openbare Werken.

Dep.V dan W dikepalai oleh seorang Direktur, yang membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten sesuai dengan tugas/wewenang Departemen. Setelah Belanda menyerah dalam perang pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak ada Pusat Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah pemerintahan tersebut.

Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi Jaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari Pihak Jepang, Kantor Pusat “V & W”. Di Bandung, dinamakan “Kotubu Bunsitsu”, sejak saat itu istilah “Pekerjaan Oemoem” (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), “ Pekerjaan Umum” (PU), disamping “Doboku” lazim dipergunakan.

Kotubu Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai ubungan dengan wilayah Pemerintahan di Jaw/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerah daerah, di Karesidenan-Karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri. Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama jaman Ned.Indie, disamping Menurut sistem Jepang. Setelah Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut

kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di Pusat Pemerintahan (Jakarta/ Bandung) maupun Pemerintahan Daerah- daerah. Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk cabinet yang pertama, maka pada menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V & W.(dikenal dengan nama “Gedung Sate”).

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan di Hindia Belandasebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda-pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain “Gedung Sate” yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa “3 Desember 1945”).

Waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementerian PU. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke Jakarta. Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada waktu itu. Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali Organisasi PUT dibentuk dengan Ir. Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 NO.3/PRT/1968 dan diroboh dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi. Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep.PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri

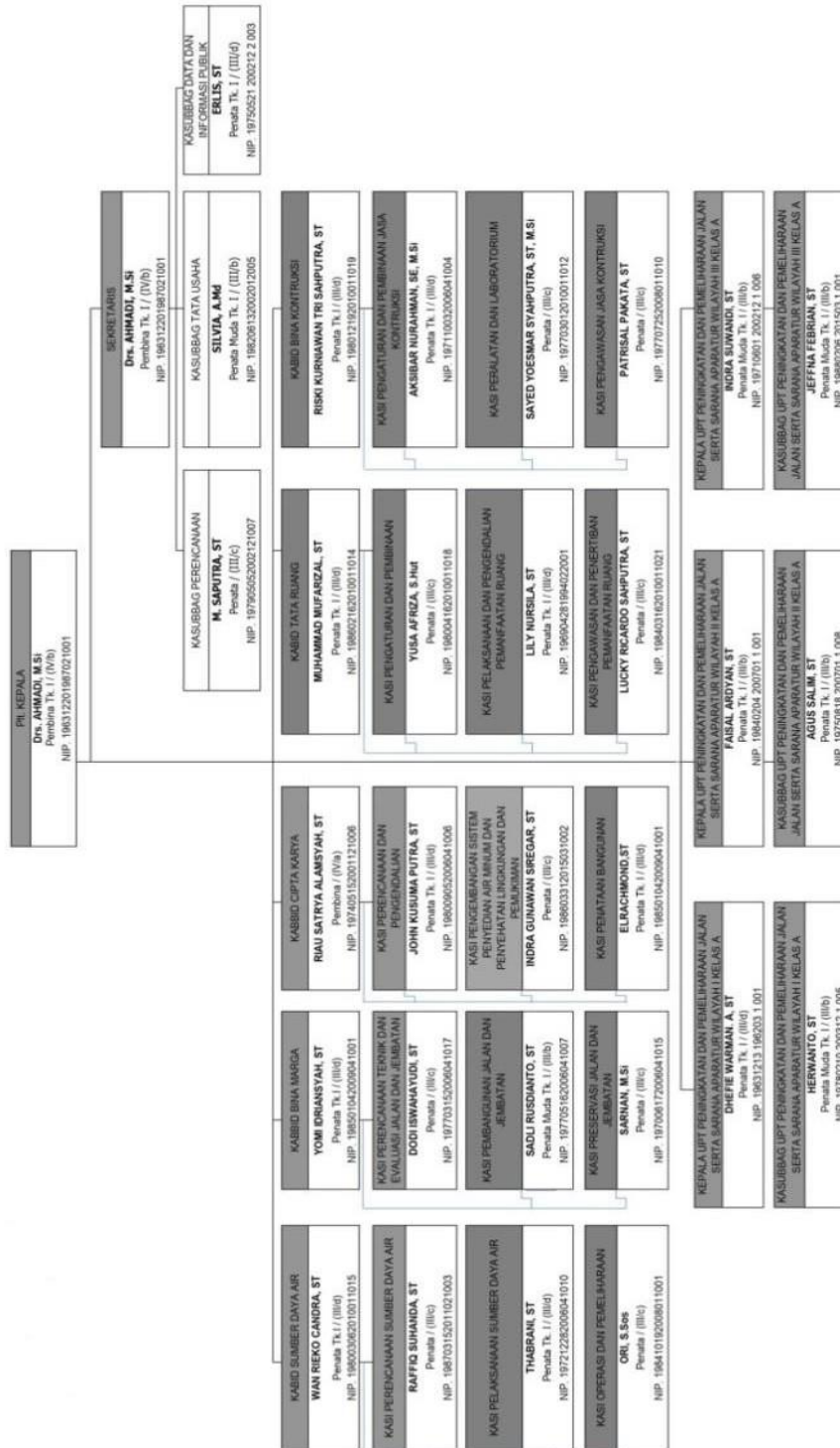
1.1.2 Latar Belakang PUPR Dumai

Sebelum terbentuknya Dinas PUPR, terdapat beberapa kali perubahan nomenklatur dan susun organisasin. Berdasarkan undang-undang No 16 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829) Tanggal 20 april 1999 Administratif Dumai ditingkatkan menjadi kota madya daerah tingkat II Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai No 5 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah terbuntuklah Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Kebersihan, yang ditetapkan oleh Walikota Dumai pada saat itu yaitu H. Wan Syamsir Yus. Kemudian pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan daerah no. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor5tahun2001tentang Organisasi danTataKerjaDinas -DinasDaerah berubahlah nomekelatur terbuntuklah Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Kebersihan menjadi terbentuklah Dinas Permukiman danPrasarana Wilayah Kota Dumai.

Perubahan nomenkelatur ketiga pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yang ditetapkan oleh Walikota Dumai pada saat itu yaitu H. Zilkifli A.S.

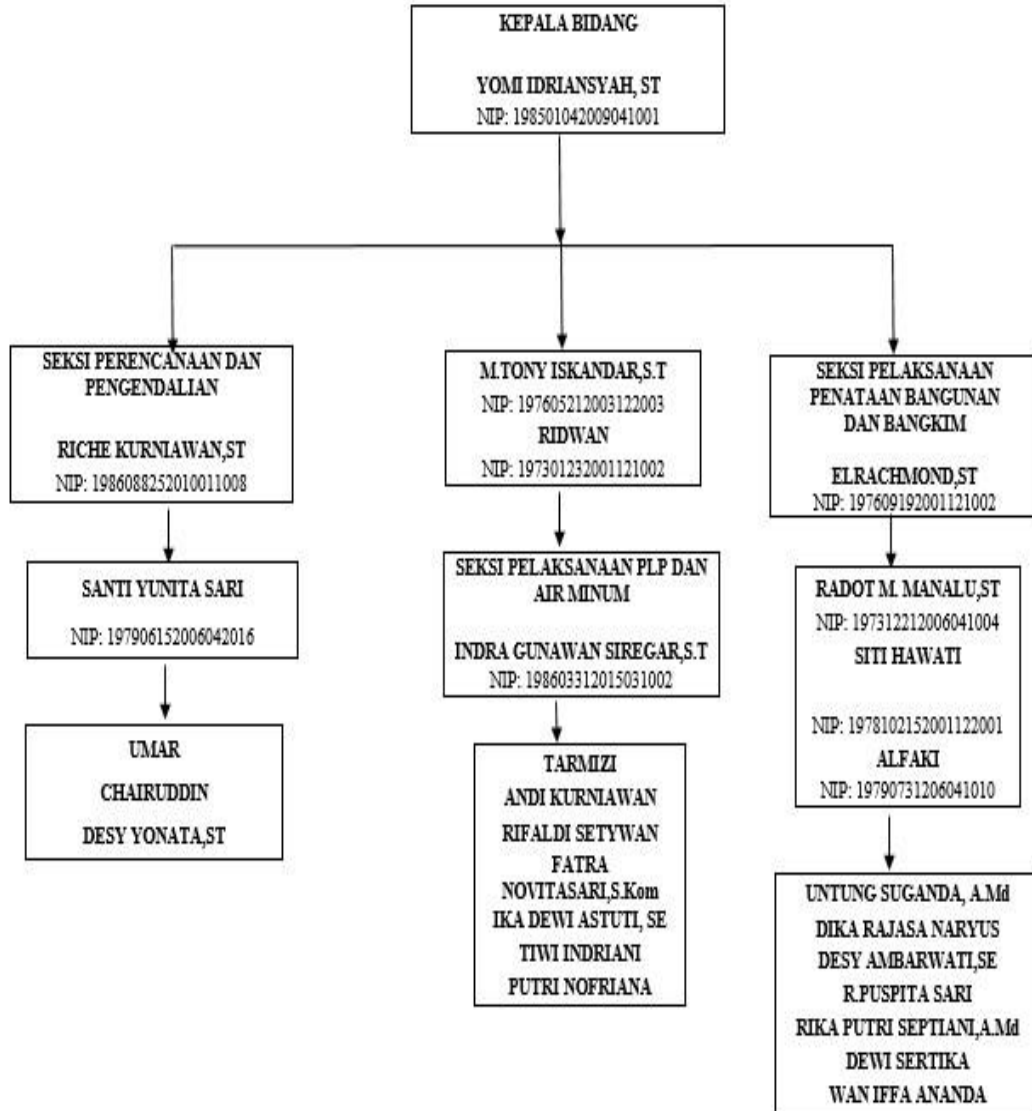
Perubahan keempat terjadi pada Tahun 2018, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 4 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, berubahlah nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, dan nomenkelatur ini dipakai sampai saat ini.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI



Gambar 1.1 Struktur organisasi PUPR Kota Dumai
Sumber : Data Proyek

STRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA PUPR KOTA DUMAI TAHUN 2022



Gambar 1.2 Struktur organisasi PUPR bidang Cipta Karya Kota Dumai
Sumber : Data Proyek

1.2 Tujuan Proyek

Sebelum di lakukan pembangunan dinas lh melakukan pekerjaan di rumah dinas oleh karena itu CV.CAHAYA KARYA TEKNIK melakukan pembangunan gedung untuk menunjang pekerjaan yang ada di dinas lingkungan hidup.

1.3 Struktur Organisasi perusahaan

Dalam suatu perusahaan struktur organisasi perusahaan merupakan suatu susunan yang berisi tentang pembagian peran dan tugas setiap orang berdasarkan jabatan yang dimiliki di perusahaan tersebut. Dimana diperlukan untuk kelancaran suatu proyek.

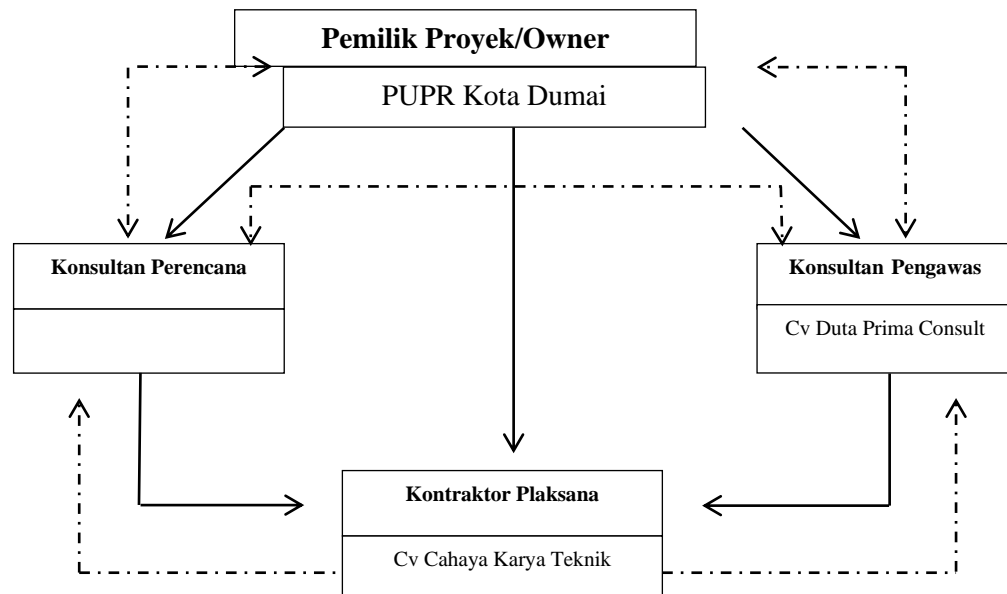
a. Pemilik Proyek (Owner)

Pemilik proyek (*owner*) adalah PUPR Kota Dumai atau instansi yang memiliki sebuah proyek atau pekerjaan dan memberikan kepada pihak lain yang bisa menyelesaikan sesuai dengan kontrak kerja.

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang adalah pemilik proyek (*owner*) di proyek ini. adapun tugas dan wewenang pemilik proyek (*owner*) adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan proyek secara langsung untuk mencapai kualitas yang telah ditentukan.
2. Membuat perjanjian kontrak dengan kontraktor yang berisi tugas dan kewajiban sesuai dengan prosedur
3. Menyediakan dana diperlukan dalam proyek
4. Menunjuk kontraktor pemenang tender untuk menjalankan proyek tersebut.
5. Memberikan tugas kepada perencana untuk merencanakan proyek tersebut
6. Memberi informasi yang dibutuhkan kontraktor dan konsultan perencana terhubung dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek

Adapun skema hubungan pihak yang terlibat pada Proyek Pembangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebagai berikut:



————— Garis Perintah
 Grais Kordinasi

Keterangan Garis :

1. Garis Perintah adalah garis lurus tegas yang menghubungkan dua organisasi dimana organisasi yang dihubungkan oleh garis tersebut saling bertanggung jawab satu sama lain. Menetapkan rantai wewenang dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan terendah dalam organisasi. Ini menunjukkan siapa yang memiliki kekuatan pengambilan keputusan di berbagai level. Informasi umumnya mengikuti jalur hierarki dari tingkat manajemen puncak ke tingkat operasional. Tanggung jawab ini biasanya lebih besar di tingkatan manajemen atas dan lebih spesifik di tingkat manajemen rendah.
2. Garis Koordinasi adalah garis lurus putus-putus yang menghubungkan dua organisasi dimana organisasi yang dihubungkan oleh garis tersebut hanya saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.

b. Kontraktor Pelaksana

Kontraktor adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pemborongan. Berupa perorangan maupun badan hukum baik pemerintah maupun swasta. Yang telah ditetapkan pemilik proyek serta mentandatangani surat perjanjian kerja (SPK). Kontraktor pelaksana ini berkerja dengan mengacu pada gambar kerja (*bestek*), rencana kerja dan syarat (RKS) yang telah disusun sebelumnya.

Adapun kegiatan dari kontraktor pelaksana adalah:

1. Melaksanakan semua kesepakatan didalam kontrak kerja baik dari segi *schedulling* pelaksanaan maupun masa pemeliharaan.
2. Mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh direksi.
3. Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor harus membuat dan menyerahkan gambar kerja (*shop drawing*) serta metode kerja.
4. Menyediakan tenaga kerja, bahan, perlengkapan juga jasa yang diperlukan sesuai spesifikasi teknis dengan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan :
 - a) Biaya pelaksana
 - b) Waktu pelaksana
 - c) Kualitas pekerja
 - d) Kuantitas pekerja
 - e) Keamanan kerja

c. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas adalah orang atau badan yang mengadakan pengawasan utama dalam pelaksanaan sesuai dengan gambar-gambar kerja yang telah di rencanakan.

Tugas dan kewajiban konsultan pengawas antara lain:

1. Mengendalikan pengawasan secara menyeluruh atas penyimpangan dan hambatan yang mungkin terjadi
2. Menyelenggarakan kordinasi aktif sebagai pihak yang terlibat diproyek

3. Mengadakan penilaian terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor serta pembuatan berita acara penyerahan
4. Melakukan pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan
5. Melakukan pengawasan atas kualitas bahan, peralatan dan tenaga kerja
6. Mengkonsultasikan segala pekerjaan yang sedang berlangsung.

d. **Konsultan Perencana**

Konsultan perencana memiliki tugas yang merencanakan suatu rencana dalam perencanaan struktur, arsitektur, dan mekanikal/elektrikal, sesuai ketentuan yang diinginkan pemilik proyek. Tugas konsultan perencana adalah:

1. Membuat sketsa dan memberikan suatu gagasan gambaran pekerjaan.
2. Membuat gambar detail/penjelasan lengkap dengan perhitungan konstruksi
3. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan rencana anggaran biaya (RAB)
4. Tempat berkonsultasi jika ada hal-hal yang meragukan dibidang arsitektural dan struktur.

1.4 Ruang Lingkup

Dinas PUPR Kota Dumai bidang Cipta Karya bergerak dalam bidang konstruksi gedung dan bangunan sipil. berikut proyek yang telah diselesaikan oleh Dinas PUPR Kota Dumai bidang Cipta Karya diantaranya adalah:

1. Pembangunan Kantor Dinas PUPR tahun 2023
2. Pembangunan Kantor Dinas Sosial tahun 2023
3. Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan tahun 2023
4. Pembangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023